



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JULI 2017**

Pendahuluan

Komnas HAM mau tidak mau harus diakui menjadi lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Korporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini menyebabkan masyarakat luas lebih memahami bahwa fungsi pokok Komnas HAM adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan. Diatur dalam Pasal 90 dan 91 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Juli 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **399 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

No	Kategori Berkas	Jumlah
1	Berkas Kasus Baru 1x	53
2	Berkas Kasus Lanjutan	210
3	Berkas Baru 1x File	87
4	Berkas Lanjutan File	49
	Jumlah	399

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	1	20	Kalimantan Barat	4
2	Sumatera Utara	23	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	0	22	Kalimantan Tengah	4
4	Jambi	7	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	17	24	Kalimantan Utara	2
6	Sumatera Barat	21	25	Gorontalo	0
7	Sumatera Selatan	18	26	Sulawesi Selatan	14
8	Lampung	11	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	28	Sulawesi Tengah	5
10	Kepulauan Riau	3	29	Sulawesi Utara	1
11	Banten	8	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	35	31	Sulawesi Selatan Barat	0
13	DKI Jakarta	87	32	Maluku	10
14	Jawa Tengah	20	33	Maluku Utara	1
15	Jawa Timur	41	34	Papua	10
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	35	Tanpa Alamat	26
17	Bali	4	36	AS	1
18	Nusa Tenggara Barat	2	37	Australia	1
19	Nusa Tenggara Timur	4		Jumlah	399

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	212
2	Subkomisi mediasi	49
3	Tim 65	0
4	Tim KZ	0
5	TIM	2
6	File	136
	Jumlah	399

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	219
2	Tembusan	176
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	4
Jumlah		399

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	46
2	Pos	311
3	Fax	3
4	Email	32
5	Online	6
6	Audiensi	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	0
Jumlah		399

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	4
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	3
4	Hak memperoleh keadilan	103
5	Hak atas kebebasan pribadi	6
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	167
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	0
10	Hak anak	0
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	83
Jumlah		399

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	0
Lingkungan hidup	4
	4
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	3
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
	3
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	80
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	2
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	19
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	2
	103
V. Hak atas kebebasan pribadi	
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
	6
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	8
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	6
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	2
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0

Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	9
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	5
	30
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	7
Hak atas kepemilikan tanah	72
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	45
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	19
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	22
Hak atas kesehatan	1
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	1
	167
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	1
	3
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	0
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	0
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	83
Jumlah Seluruh	399

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Pemerintah daerah	1
2	Lembaga negara (non kementerian)	1
3	Korporasi	5
4	Lembaga pelayanan kesehatan	1
5	Lembaga pendidikan	2
6	Individu - Orang seorang	197
7	Individu - Anak	3
8	Individu - Perempuan	6
9	Individu - Buruh migran	2
10	Individu - Pekerja/Profesi	21
14	Individu - Penyandang cacat	2
17	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
19	Individu - Fakir Miskin	1
20	Individu - Narapidana	2
21	Kelompok - Masyarakat	91
22	Kelompok - Anak anak	5
25	Kelompok - Pekerja	25
26	Kelompok - Masyarakat Adat	5
27	Kelompok - Ras dan Etnis	1
28	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	3
32	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
36	Organisasi	3
37	Warga Negara Asing (WNA)	1
38	Tanpa Keterangan Pihak Korban	18

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah
1	Pemerintah pusat (kementerian)	44
2	Pemerintah daerah	44
4	Lembaga negara (non kementerian)	4
5	Lembaga peradilan	23
6	POLRI	110

7	TNI	12
8	Kejaksaan	9
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	2
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	72
12	BUMN/BUMD	22
13	Lembaga pelayanan kesehatan	4
14	Lembaga pendidikan	1
15	Individu - Orang seorang	6
16	Individu - Pekerja/Profesi	13
17	Kelompok - Masyarakat	8
18	Kelompok - Pekerja	1
19	Organisasi	3
21	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	19